

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBINAAN DESA
DI PEKON SUKOHARJO IV KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2017/2018**

(Skripsi)

Oleh
MARATUS SHOLEKHAH



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBINAAN DESA DI PEKON SUKOHARJO IV KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

Maratus Sholekhah

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap program pembinaan desa di Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Jumlah sampel 43 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan tehnik penunjang wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh 6 responden atau 13,95% berkategori negatif, kemudian 13 responden atau 30,23 % berkategori cenderung negatif, dan 17 responden atau 39,53 % berkategori cenderung positif sedangkan 7 responden atau 16,28 % cenderung positif. Berdasarkan data yang dianalisis dengan demikian masyarakat cenderung positif terhadap program pembinaan desa namun kurang peduli dan tidak mau berpartisipasi .

Kata kunci : Masyarakat, Persepsi, Program Pembinaan Desa

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBINAAN DESA
DI PEKON SUKOHARJO IV KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2017/2018**

(Skripsi)

Oleh
MARATUS SHOLEKHAH

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN
Pada
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PROGRAM PEMBINAAN DESA DI PEKON
SUKOHARJO IV KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : **Maratus Sholekhah**

No. Pokok Mahasiswa : **1413032039**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.
NIP 19531018 198112 2 001

Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn

Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

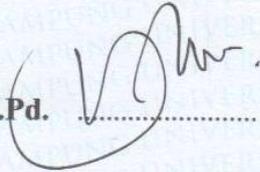
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.**



Sekretaris : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



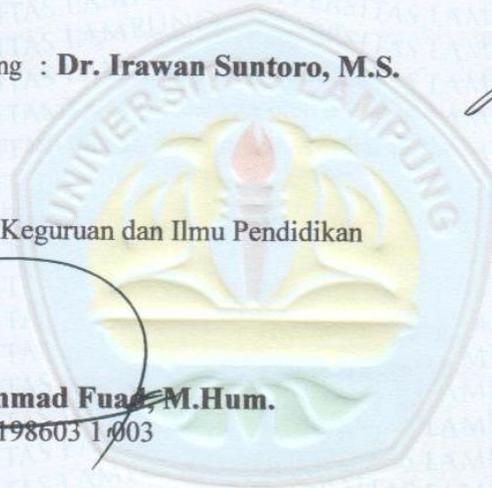
Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Irawan Suntoro, M.S.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP. 19590722 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Juli 2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maratus Sholekhah
NPM : 1413032039
Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 25 Juli 2018

Pemberi Pernyataan



Maratus Sholekhah

NPM 1413032039

RIWAYAT HIDUP



Maratus Sholekhah dilahirkan pada tanggal 27 Maret 1996 di Sukoharjo IV. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mujiono dan Alm.Ibu Marikem. Penulis mempunyai dua kakak perempuan yaitu Nur Hayati dan Uswatun Khasanah.

Pendidikan Formal yang pernah ditempuh penulis antara lain :

1. Pendidikan SD Negeri I Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, lulus tahun 2008
2. Pendidikan SMP Negeri I Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, lulus tahun 2011
3. Pendidikan SMA Negeri 2 Kabupaten Pringsewu, lulus tahun 2014

Kemudian tahun 2014 penulis diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui jalur SBMPTN. Dan pada bulan Juli 2017 sampai bulan September 2018 penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri I Way Tuba dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Bandar Sari yang berada di Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah

(Thomas Alva Edison)

PERSEMBAHAN

Semua yang telah kucapai tidak lepas dari rasa syukurku kepada ALLah SWT. Kupersembahkan karya ini dengan kasih sayang yang tulus kepada :

Kedua orang tua ku tercinta Bapak Mujiono dan Alm. Ibu Marikem atas segala kasih sayang, dukungan, bimbingan dan seluruh doa yang tak pernah putus dipanjatkan untuk keberhasilan dan tercapainya cita-citaku.

“ Terima kasih bapak, terima kasih ibu ”.

Kakak-kakak dan adik-adiku tercinta yang telah membantu, mendukung, memotivasi, dan doa untuk keberhasilanku

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Program Pembinaan Desa di Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran serta bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Fuad, M.Hum. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr.Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
3. Bapak Drs.Hi.Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

4. Bapak Drs Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung,
5. Bapak Drs.Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
7. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd., selaku pembimbing I terimakasih atas saran dan masukannya.
8. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II terimakasih atas saran dan masukannya.
9. Bapak Dr. Irawan Suntoro, M.S selaku pembahas I terimakasih atas saran dan masukannya.
10. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya.
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan.
12. Terimakasih untuk Kak Muklas, S.Pd yang selalu memberikan motivasi kepada saya dalam menjalani perkuliahan dan terselainya penulisan skripsi ini.

13. Bapak Sukartono selaku Kepala Pekon Sukoharjo IV yang telah memberikan izin penelitian untuk penulisan skripsi ini.
14. Terimakasih untuk semua masyarakat Pekon Sukoharjo IV yang telah bersedia membantu dan memberikan keterangan dalam mengisi angket penulisan skripsi ini.
15. Terimakasih untuk orang tuaku tercinta Ayahanda Mujiono dan Alm. Ibunda Marikem, terimakasih atas keikhlasan, cinta dan kasih sayang, doa, motivasi, serta ketulusan yang telah diberikan selama ini demi keberhasilanku.
16. Terimakasih Kakakku Nur Hayati, Uswatun Khasanah, Hermanto, Herman Saputra yang selalu memberikan dukungan dan motivasi
17. Terimakasih Adikku Hanifah, Yusuf, Almaira sukses buat Adikku tercinta
18. Terimakasih untuk keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
19. Terimakasih untuk Kakak terbaikku Satria Fariez Syahreza yang selalu mendukung dan memotivasiku.
20. Terimakasih untuk sahabat-sahabat terbaikku Risna Wati, Renna Otavia Sari, Rezki Afrilia, Siti Khotimah terimakasih atas doa dan dukungannya.
21. Teman-teman Seperjuangan PPL SMP Negeri I Way Tuba, Way Kanan tahun 2017, Tri Wahyuni, Novita sari, yemmi Valentini, Indah Permatasari, Irvana Vabella, Yevi Nustamela, Raisa Adira Syofitami, M. Andhika saputra, Oki Kusuma Atmaja yang telah memberikan doa dan dukungan atas terselesaikannya skripsi ini, serta Ibu Induk semang KKN-KT terimakasih atas dukungannya.

22. Teman-teman Kos Berto, Wahyu Dani Anggoro, mbk Anna, Om Syahri terima kasih atas dukungan dan motivasinya dalam terselesainya skripsi ini.
23. Keluarga Civic Education angkatan 2014 semuanya tanpa terkecuali terima kasih telah memberikan cerita baru dalam perjalanan hidup ini. Semoga akhir perkuliahan ini bukan menjadi akhir dari pertemanan dan kebersamaan kita.
24. Kakak-kakak dan adik-adik Civic Education yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.
25. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu serta rekan-rekan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan kita khususnya Pendidikan Kewarganegaraan.

Bandar Lampung, 25 Juli 2018

Penulis

Maratus Sholekhah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11
1. Kegunaan Teoritis	11
2. Kegunaan Praktis	12
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
1. Ruang Lingkup Ilmu	12
2. Subjek Penelitian	12
3. Objek Penelitian.....	13
4. Lokasi Penelitian.....	13
5. Waktu Penelitian	13
II. TINJUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritis.....	14
1. Pengertian Persepsi	14
2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Persepsi	16
3. Pengertian Masyarakat.....	17
4. Ciri-Ciri Masyarakat Pedesaan	20
5. Ciri-Ciri Masyarakat Perkotaan	21

6. Pengertian Pembinaan Desa.....	21
7. Pembinaan Desa Menurut Menteri Dalam Negeri.....	23
8. Tujuan Pembinaan Desa	25
9. Program Pembinaan Desa Pekon Sukoharjo IV	26
10. Pengertian Desa	33
11. Ciri- Ciri Desa.....	34
12. Struktur Pemerintahan Desa	37
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	37
B. Kajian Penelitian yang Relevan	41
C. Kerangka Pikir	42

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel	44
1. Populasi.....	44
2. Sampel.....	45
C. Variabel Penelitian.....	46
D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel.....	46
1. Definisi Konseptual Variabel.....	46
2. Definisi Operasional Variabel.....	47
E. Rencana Pengukuran Variabel.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
1. Teknik Pokok.....	48
2. Teknik Penunjang	49
G. Validitas dan Uji Reliabilitas	50
1. Validitas	50
2. Uji Reliabilitas	50
H. Teknik Analisis Data	52
I. Tahap Penelitian	54
1. Persiapan Pengajuan Judul.....	54
2. Penelitian Pendahuluan	54
3. Pengajuan Rencana Penelitian	55
4. Pelaksanaan Penelitian.....	55
a. Persiapan Administrasi.....	55
b. Penyusunan Alat Pengumpul Data	55
5. Pelaksanaan Uji Coba Angket	56
a. Analisis Validitas Angket	56
b. Analisis Uji Coba Angket	56

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
a. Keadaan Wilayah	62
b. Jumlah Penduduk dan Keadaan Penduduk	63
c. Tingkat Pendidikan	64
d. Visi dan Misi Desa	65
B. Deskripsi Data.....	66
1. Pengumpulan Data	66

2. Penyajian Data	67
3. Penyajian Data Persepsi masyarakat Terhadap Program Pembinaan Desa	67
a. PenyajianData Indikator Pemahaman Masyarakat Terhadap Program Pembinaan Desa	67
b. PenyajianData Indikator TanggapanPemahaman Masyarakat Terhadap Program Pembinaan Desa	71
c. PenyajianDataIndikator HarapanPemahaman Masyarakat Terhadap Program Pembinaan Desa	74
C. Penyajian Data Berdasarkan Indikator Pemahaman, Tanggapan, Dan Harapan	78
D. Pembahasan.....	80
1. Indikator Pemahaman	81
2. Indikator Tanggapan	85
3. Indikator Harapan	89
E. Pembahasan Berdasarkan Indikator Pemahaman, Tanggapan, dan Harapan	92
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Program Pembangunan Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	6
2.	Perencanaan Pembinaan Desa Yang Di biayai Swakelola Masyarakat di Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	9
3.	Populasi Penelitian Masyarakat di Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	44
4.	Sampel Penelitian Masyarakat di Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	45
5.	Hasil Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden Untuk Item Ganjil(X).....	57
6.	Hasil Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden Untuk Item Genap(Y)	58
7.	Distribusi Skor Antara Item Ganjil dan Genap Dari Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden	59
8.	Jumlah Penduduk Pekon Sukoharjo IV Tahun 2017/2018	63
9.	keadaan Penduduk Pekon Sukoharjo IV Menurut Mata Pencahariannya	64
10.	Jumlah Penduduk Sesuai Tingkat Pendidikan	64
11.	Distribusi Skor Angket Dari Indikator Pemahaman	68
12.	Distribus Frekuensi Indikator Pemahaman	70
13.	Distribusi Skor Angket Dari Indikator Tanggapan	71
14.	Distribusi Frekuensi Indikator Tanggapan.....	73
15.	Distribusi Skor Angket Dari Indikator Harapan	74
16.	Distribusi Frekuensi Indikator Harapan	77
17.	Distribusi Frekuensi Indikator Pemahaman, Tanggapan,dan Harapan	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rencana Judul Skripsi
2. Surat Keterangan Dekan FKIP UNILA
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
4. Surat Balasan Penelitian Pendahuluan
5. Surat keterangan telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
6. Lembar Persetujuan Seminar Proposal
7. Surat Keterangan
8. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas II
9. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas I
10. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing II
11. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing I
12. Surat Rekomendasi
13. Surat Izin Penelitian
14. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
15. Lembar Persetujuan Seminar Hasil
16. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Hasil
17. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembahas I
18. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing I
19. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing II
20. Surat Rekomendasi
21. Kisi- Kisi Angket
22. Angket Penelitian
23. Tabel Distribusi Hasil Angket

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah Provinsi, terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Untuk melaksanakan tujuan atau cita-cita Bangsa Indonesia, sudah semestinya daerah-daerah yang ada di Indonesia turut merasakan pembangunan yang adil dan merata, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia tercapai sesuai dengan amanat UUD 1945, oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta untuk meningkatkan hasil- hasil pembangunan daerah bagi masyarakat yang adil dan merata. Oleh karena itu pembangunan

daerah juga ditujukan untuk mengatasi masalah kesenjangan antar daerah, antar wilayah, antar kawasan, antar kota, antar desa, antara kota dan desa, serta antar golongan masyarakat. Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efektif dan efisien, termasuk penyebaran hasilnya secara merata di seluruh Indonesia, adalah koordinasi dan keterpaduan antar sektor, antar sektor dan daerah.

Unit satuan pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini adalah pemerintahan desa, yang dalam masa perkembangannya pada saat ini merupakan ujung tombak kunci dari pelayanan pemerintah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Desa merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan tertentu yang mempunyai ciri-ciri, dimana mereka saling mengenal, corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam, ukuran komunitasnya tidak terlalu besar, penduduknya tidak padat, adat istiadat masih dipegang dengan kuat, mobilitas sosialnya rendah, dan mempunyai kesetiakawanan yang tinggi. (Soelaeman : 2009)

Dalam menjalankan fungsi sebagai instansi vertikal dari pemerintah pusat, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam menjalankan pemerintahan di ruang lingkup administratifnya dan juga dalam pengelolaan proses sosial serta pembinaan di masyarakat desa tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan menurut Moch. Solekhan (2012) tugas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah bagaimana agar

menciptakan kehidupan desa yang demokratis, dan memberikan pelayanan publik yang baik sehingga dapat membawa masyarakat desa pada kehidupan yang sejahtera, tentram, adil dan aman.

Pasal 18 UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan desa ,meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam PP No.72 Tahun 2015 Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan pendidikan, pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. sasaran utama dari program pembinaan adalah daerah pedesaan.

Dalam mewujudkan pembinaan nasional pemerintah memberikan suatu kewenangan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mewujudkannya dalam hal mengembangkan perekonomian bangsa dalam berbagai bentuk. Perwujudan yang diinginkan dan dicita-citakan tersebut yaitu pergerakan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki daerah pedesaan yang banyak sehingga pembinaan di daerah pedesaan bertujuan untuk menempatkan desa sebagai sasaran program pembinaan untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan desa dan kota.

Pembinaan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan yang berpolitik yang lebih demokratis. Program pembinaan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisah dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada ditengah masyarakat. Karena dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembinaan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Program pembinaan desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan wilayah terutama perdesaan, dengan hasil pembangunan yang signifikan akan mereduksi timbulnya desa-desa yang tertinggal dan terpinggirkan. Munculnya upaya pembinaan masyarakat pedesaan disebabkan oleh beberapa alasan yaitu masih kurang berkembang dan terbatasnya akses masyarakat pedesaan pada sumber daya produktif, kurangnya pengetahuan terhadap pengelolaan lahan, permodalan, masih terbatasnya sarana dan prasarana,serta kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonom perkotaan dan perdesaan yang mengakibatkan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan infrastruktur antar wilayah.

Pembinaan desa atau perdesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup pembangunan di segala bidang baik fisik material maupun mental spiritual dalam satu kesatuan integritas usaha yang

menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, program pembinaan perdesaan yang telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, belum memberikan hasil yang memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Rencana program pembinaan desa harus disusun berdasarkan pada potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada sekarang. Kondisi yang ada meliputi modal, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana pembangunan, teknologi, aspirasi masyarakat setempat, dan lainnya. keterbatasan dana atau anggaran pembangunan, sedangkan program pembinaan yang dibutuhkan relatif banyak maka perlu dilakukan penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan disusun berdasarkan kriteria yang terukur, peningkatan partisipasi masyarakat

Dalam melaksanakan pembinaan desa membutuhkan sebuah program program yang disesuaikan dengan potensi yang nantinya dapat mendukung dalam kegiatan- kegiatan yang dapat memajukan pembangunan. Program dari pemerintah yang disesuaikan kembali oleh kepala desa dan dimusyawarahkan oleh tokoh- tokoh agama, tokoh masyarakat, RT/RW, pemerintah pekon beserta BHP(Badan Himpun Pekon) dalam rangka mengemukakan semua gagasan yang ada sehingga semua aspirasi masyarakat dapat tertampung. Jenis kegiatan program- pembinaan desa yang telah direncanakan terdapat dalam program pembangunan yaitu dalam

bidang sarana dan prasarana, dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang agama.

Tabel 1. Program Pembangunan Pekon Sukoharjo IV

BIDANG	JENIS KEGIATAN
Bidang Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/ rehab balai pekon 2. Saluran air 3. Jembatan dan gotong royong 4. Sarana transportasi 5. Sarana pendidikan 6. Sarana kesehatan
Bidang Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan BUMPek 2. Saluran air pertanian 3. Pembinaan ketrampilan 4. Bantuan permodalan 5. Menjaln kemitraan/kerjasama dengan pihak ketiga
Bidang Sosial budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan siskamplng 2. Menumuhkan kesadaran sosial masyarakat
Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan wirausaha 2. Peningkatan SDM(PKK dan kader keuangan) 3. Pelatihan pertanian 4. Pelatihan ketrampilan home industry
Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan saluran pembuangan 2. MCK/ jamban sehat 3. Pembuatan sumur bor 4. Pembuatan tempat sampah ditiap rumah
Bidang Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/ rehab masjid 2. Pembangunan/ rehab mushola 3. Pembangunan/ rehab TPA

Sumber : Rencana program pembangunan jangka menengah pekon Sukoharjo IV

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa banyak program pembinaan yang dilakukan dalam rangka pembangunan desa. pembinaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Menciptakan suatu program pembinaan

merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani sebuah permasalahan di daerah pedesaan. Banyak permasalahan yang ada di desa Sukoharjo IV terutama dalam bidang ekonomi. Pemerintah desa berupaya melakukan program pembinaan atau pelatihan yaitu pelatihan pertanian, pembinaan ketrampilan, dan pelatihan ketrampilan home industri. Selain kegiatan pembinaan dalam bidang ekonomi pekon Sukoharjo IV juga telah melakukan pembinaan dalam bidang lembaga kemaasyarakatan, pembinaan organisasi perempuan dan PKK, serta pembinaan dalam bidang kesenian dan sosial budaya.

Kegiatan pembinaan dalam bidang lembaga kemasyarakatan dengan upaya peningkatan kinerja para aparat desa agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan bertanggung jawab sesuai dengan jabatan masing-masing dan membantu pemerintah dalam memajukan desa. lembaga- lembaga masyarakat tersebut diantaranya RT, RW, Karang Taruna, BHP, Kaur, PKK, dan Keamanan. bentuk pembinaan dalam lembaga masyarakat ini berupa pelatihan, rapat, dan peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik.

Pembinaan dalam bidang organisasi perempuan dan pkk dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan yang dilakukan untuk pembangunan desa perempuan juga memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pembangunan desa. kegiatan yang dilakukan organisasi perempuan dan PKK yaitu pelatihan kegiatan rismaan, rebanaan, dan tilawah Qur'an yang dilakukan setiap minggu. Pembinaan ibu- ibu PKK berupa pelatihan atau pengembangan usaha kreatif.

Dalam bidang kesenian dan sosial budaya pemerintah desa juga melakukan program pembinaan dengan tujuan untuk mengembangkan kesenian daerah serta mempertahankan nilai- nilai sosial budaya yang ada dimasyarakat.

Kegiatan pembinaan yang telah rutin dilakukan pelatihan kuda kepeng dan pencak silat yang dilakukan dua kali dalam seminggu. Harapan dari pemerintah desa pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kreativitas pemuda agar dapat mengikuti perlombaan antar wilayah desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa

Pembinaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba,dan peringatan hari-hari besar.semua program yang telah direncanakan oleh pemerintah tidak akan berjalan sesuai harapan apabila tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Untuk keberhasilan program pembinaan dibutuhkan partisipasi masyarakat desa. Partisipasi dan keikutsertaan masyarakat merupak kunci utama keberhasilan dari program pembinaan tersebut dalam rangka pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan sangat penting karena masyarakat yang mengetahui permasalahan yang ada serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kepala Desa sudah mengadakan sosialisasi tentang program- program pembinaan desa namun masyarakat yang mengikuti atau yang hadir hanya sedikit. Masyarakat lebih mementingkan pekerjaannya dibanding mengikuti sosialisasi pembinaan. Tujuan dari kepala desa mengadakan program pembinaan adalah mengurangi tingkat pengangguran, memfasilitasi masyarakat yang mempunyai ketrampilan lebih namun tidak bisa di

manfaatkan, selain itu tujuannya adalah mengasah ketrampilan dalam bidang industri kecil (penanaman jahe, pembuatan kripik singkong, dan pembuatan bata merah) dengan berkurangnya tingkat pengangguran dan kemajuan di bidang ekonomi dapat meningkatkan pembaangunan desa. namun kurangnya pengawasan dan kinerja dari aparatur desa membuat program pembinaan yang ada hanya berjalan diawal saja tidak dapat berkelanjutan. (wawancara dengan Bapak Kepala Pekon, tanggal 10 Februari 2018)

Tabel 2. Perencanaan Pembinaan Desa yang dibiayai Swakelola Masyarakat

Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Sumber Dana
Pembinaan ibu- ibu PKK	Mengaktifkan kembali kegiatan ibu- ibu PKK	APBD
Pembinaan remaja islam masjid	Mengurangi kenakalan remaja	APBD
Penyuluhan kelompok tani	Meningkatkan penghasilan pertanian	APBD
Penambahan modal usaha	Meningkatkan penghasilan masyarakat	APBD/APBN

Sumber : Rencana program pembinaan jangka menengah pekon Sukoharjo

IV

Berdasarkan tabel 2 di atas program-program pembinaan desa mempunyai anggaran dana yang telah diberikan oleh pemerintah dalam rangka menuju pembangunan desa yang lebih baik. Anggaran dana bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah maupun anggaran pendapat belanja nasional. Anggaran dana sudah dikeluarkan oleh pemerintah namun Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembinaan desa merupakan salah satu masalah yang akan menghambat program pembinaan.

Banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang pentingnya suatu program pembinaan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat terhadap program pembinaan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dari seorang warga kurangnya partisipasi masyarakat mengenai program tersebut karena kurangnya sosialisasi dari kepala desa. Sehingga membuat masyarakat tidak aktif dalam mengikuti program-program yang telah direncanakan Masyarakat juga beranggapan bahwa program-program pembinaan yang dilakukan tidak akan merubah nasib mereka dan tidak menjadikan desa tempat tinggal mereka lebih maju lagi. Pandangan masyarakat yang salah dengan tujuan program pembinaan desa merupakan salah satu masalah yang dapat membuat kemajuan pembangunan desa terhambat. (wawancara dengan Ibu Lisa tanggal 12 Februari 2018)

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Program Pembinaan Desa di Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Persepsi masyarakat terhadap program pembinaan desa
2. Partisipasi masyarakat yang kurang terhadap program pembinaan desa

3. Pentingnya sosialisasi dari pemerintah desa dan aparatur desa terhadap program pembinaan desa

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian tidak terlalu jauh menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi masalah ini pada persepsi masyarakat terhadap program pembinaan desa di Pekon Sukoharjo IV kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap program pembinaan desa di Pekon Sukoharjo IV kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu?”

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persepsi masyarakat terhadap program pembinaan desa di Pekon Sukoharjo IV kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk mengembangkan konsep dan teori-teori dalam ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam kajian Hukum dan Kemasyarakatan karena

membahas tentang persepsi masyarakat terhadap program pembinaan desa di Pekon Sukoharjo IV kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Masyarakat memiliki pengetahuan yang luas tentang program pembinaan desa
- b. Untuk memberikan masukan terhadap aparat desa dan warga desa dalam meningkatkan peranannya
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian yang lebih lanjut tentang program pembinaan desa dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan guna mendapatkan solusi dari permasalahan yang timbul akibat kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya program pembinaan desa

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan yang mengkaji tentang hukum dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan pusat, daerah, dan desa dalam upaya membina pengetahuan masyarakat terhadap program pembinaan desa yang dapat memajukan pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap program pembinaan desa di pekon Sukoharjo IV, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu.

4. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah dilakukan di Pekon Sukoharjo IV, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu.

5. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkan surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung No. 118/UN26.13/PN.01.00/2018 dari tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan selesai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoretis

1. Pengertian Persepsi

Menurut (Branca, 1964; Woodworth dan Marquis, 1957). “Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera”. Namun proses tersebut tidak berhenti disitu saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya yaitu proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya.

Menurut Davidoff dalam Bimo Walgito, (2010:100) : “Persepsi merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi

dapat dikemukakan karena perasaan kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan yang lain”.

Menurut Slameto, (2010:102) : “Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya peran atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium”.

Menurut Robbins, (2003:97) : “Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna”

Menurut Moskowitz dan Orgel dalam Bimo Walgito, (2003:54) :“persepsi merupakan proses integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan persepsi adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera karena perasaan, kemampuan berfikir, menyeleksi dan dapat memberikan makna dan hasil persepsi akan berbeda antar individu.

2. Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Pada Persepsi

Menurut Bimo walgito, (2003:54). Di depan telah dipaparkan bahwa apa yang ada dalam diri individu akan mempengaruhi dalam individu mengadakan persepsi, ini merupakan faktor internal. Disamping itu masih “ada faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam proses persepsi, yaitu faktor stimulus itu sendiri dan faktor lingkungan di mana persepsi itu berlangsung, dan ini merupakan faktor eksternal. Stimulus dan lingkungan sebagai faktor eksternal dan individu sebagai faktor internal saling berinteraksi dalam individu mengadakan persepsi”.

Mengenai keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi datang dari dua sumber, yaitu yang berhubungan dengan segi kejasmanian, dan yang berhubungan dengan segi psikologis. Bila system fisiologisnya terganggu, hal tersebut akan berpengaruh dalam persepsi seseorang. Sedangkan psikologis seperti telah dipaparkan didepan, yaitu antara lain mengenai pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir, kerangka acuan, motivasi akan berpengaruh pada seseorang dalam mengadakan persepsi.

Sedangkan lingkungan atau situasi khususnya yang melatarbelakangi stimulus juga akan berpengaruh dalam persepsi, lebih- lebih bila objek persepsi adalah manusia. Objek dan lingkungan yang melatarbelakangi objek merupakan kebulatan atau kesatuan yang sulit dipisahkan. Objek yang sama dengan situasi social yang berbeda, dapat menghasilkan persepsi yang berbeda.

3. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan.

Ada beberapa definisi tentang masyarakat. Mengambil berbagai pendapat, Soekanto (1999) menuliskan sebagai berikut:

1. Mac Iver & Page mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan pergolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan sosial yang selalu berubah.
2. Ralph Linton mengatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama sudah cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggapnya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
3. Selo Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.
4. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Soekanto, 1999).

5. Aguste Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan ke;ompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.
6. Hassan Shadily mengatakan bahwa masyarakat dapat didefnisikan sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya terjalin secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.

Dari definisi di atas dapat ditarik benang merah, bahwa masyarakat adalah:

- a. Manusia yang hidup bersama
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
- d. Mereka merupakan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang hidup bersama.

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Abdul Syani, 1987), menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri- ciri pokok yaitu:

- a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka miniumnya ada dua orang yang hidup bersama.

- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda- benda mati seperti umpamanya kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia- manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap- cakap, merasa dan mengerti; mereka juga mempunyai keinginan- keinginan untu menyampaikan kesan- kesan atau perasaan- perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan- peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompk tersebut.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Menurut Ahmadi dalam buku Abdul Syani, (2006 : 2) “masih terdapat faktor-faktor lain yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat, yaitu:

1. Adanya dorongan seksual, yaitu dorongan manusia untuk mengembangkan keturunannya.
2. Adanya kenyataan bahwa manusia itu adalah “serba tidak bisa” atau sebagai makhluk yang lemah. Karena ia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang terdapat dalam perserikatan dengan orang lain, sehingga mereka dapat berlindung bersama-sama, dan mengejar kebutuhan kehidupan sehari-hari, termasuk pula perlindungan keluarga itu sendiri terhadap bahaya dari luar.

3. Karena terjadinya “habit” pada tiap-tiap diri manusia. Manusia bermasyarakat, oleh karena ia telah bisa mendapat bantuan yang bermanfaat yang diterimanya sejak kecil dari lingkungannya. Tegasnya manusia telah merasakan betapa manisnya hidup bermasyarakat itu. Sehingga dia tidak mau keluar lagi dari lingkungan masyarakat yang telah memberikan bantuan yang bermanfaat baginya. Bahkan merupakan suatu tekanan jiwa yang berat bagi seseorang, jadi manusia bermasyarakat bukan karena dorongan instinktif (naluri) melainkan disebabkan adanya habit.
4. Adanya kesamaan keturunan, kesamaan teritorial, kesamaan nasib, kesamaan keyakinan (cita-cita), kesamaan kebudayaan, dan lain-lain.

4. Ciri ciri Masyarakat Pedesaan

Ciri- ciri masyarakat pedesaan yaitu

- a. Warga masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang erat dan mendalam
- b. System kehidupan berkelompok atas dasar kekeluargaan
- c. Hidup dari pertanian, pekerjaan lain hanya dianggap sebagai sampingan
- d. Tidak setiap orang mempunyai tanah, system kepemilikan tanah ada 4 macam, yakni milik umum, milik komunal dengan pemakaian bergiliran, milik komunal dengan pemakaian tetap, milik individu (Soekanto, 1999)
- e. Cara bertani masih tradisional, tidak efisien, karena belum mengenal mekanisasi.

Esti Ismawati, (2012: 53)

5. Ciri- Ciri masyarakat Perkotaan

- a. Pandangan mengenai kehidupan, masyarakat kota memperhatikan kondisi dalam berpakaian, menghidangkan makanan, peralatan rumah, dsb.
Masyarakat desa tidak mementingkan
- b. Kehidupan keagamaan berkurang disbanding dengan masyarakat desa
- c. Orang kota dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain
- d. Pembagian kerja lebih tegas dan punya batas-batas nyata
- e. Kemungkinan untuk mendapat berbagai jenis pekerjaan lebih banyak
- f. Jalan pikiran lebih rasional, interaksi sosial berdasarkan kepentingan
- g. Jalan kehidupan cepat, factor waktu sangat penting
- h. Perubahan-perubahan sosial tampaknya di kota

Esti Ismawati, (2012: 53)

6. Pengertian Pembinaan Desa

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Sedangkan Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, "pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi". Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Mathis (2009:307:308) mengemukakan empat tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategi, antara lain

1. Mengatur strategi yaitu manajer- manajer SDM dan pembinaan harus terus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana bisnis strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.
2. Merencanakan, yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembina yang akan membawa hasil- hasil positif untuk organisasi dan karyawan. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan, dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan
3. Mengorganisasi, yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan dan mengembangkan investasi- investasi pembinaan

4. Memberi pembenaran yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dimasa depan.

7. Pembinaan Desa Menurut Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Bab VI Pembinaan dan Pengawasan pasal 14 yaitu:

1. Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa dan Lurah melakukan pembinaan dan supervisi terhadap KPM secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.
2. Pembinaan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan KPM.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Bab VI Pembinaan dan Pengawasan pasal 15 yaitu:

1. Pembinaan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:
 - a. pemberian pedoman pembinaan bagi Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa dan Lurah dalam pengembangan KPM;
 - b. pemberian pedoman standarisasi, akreditasi dan evaluasi KPM;

- c. pemberian pedoman pelatihan bagi KPM dan melaksanakan pelatihan pelatih tingkat nasional serta orientasi bagi pembina KPM Provinsi;
 - d. pemberian pedoman bantuan pembiayaan kepada KPM; dan
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan KPM dalam skalanasional.
2. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri menugaskan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan pembinaan sehari-hari dan untuk berkoordinasi dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Bab VI Pembinaan dan Pengawasan pasal 19 yaitu:
- 1. Pembinaan Kepala Desa dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:
 - a. pembentukan dan penguatan KPM;
 - b. penetapan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau anggaran kelurahan untuk operasional kegiatan KPM;
 - c. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan KPM dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
 - d. pemberian fasilitasi KPM dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - e. pemberian fasilitasi KPM dalam koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan KPM dan kader teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan pemberian

penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam skala desa dan kelurahan.

2. Pembinaan operasional KPM dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Lurah.
3. Pembinaan fungsional KPM dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan.
4. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3), Kepala Desa/Lurah menugaskan perangkat desa/kelurahan untuk berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan terkait.

8. Tujuan Pembinaan Desa

Tujuan pembinaan desa yaitu:

1. Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih tepat
2. Untuk megembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya secara rasional, dan
3. Untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman- teman pegawai dan manajemen yang baik(pemimpin).

Komponen-komponen pembinaan yang dijelaskan oleh Mangkunegara

(2005:76) terdiri dari :

1. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur.
2. Para pembina yang profesional

3. Materi pembinaan dan pengembangan harus di sesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai
4. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang telah di tentukan.

Dalam pengembangan program pembinaan agar pembina dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahap atau langkah – langkah yang sistematis. Secara umum ada tiga tahap yaitu tahap perencanaan pembinaan, tahap pelaksanaan pembinaan, dan tahap evaluasi pembinaan.

Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

9. Program Pembinaan Desa Pekon Sukoharjo IV

Program Pekon Sukoharjo IV diawali dari musyawarah Dusun yang dilanjutkan ke musyawarah Pekon yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BHP dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Sukoharjo IV dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dari masyarakat Lembaga Pekon berperan aktif membantu pemerintah Pekon dalam menggerakkan program Pembangunan. Pemerintah Pekon beserta Lembaga Pekon Sukoharjo IV merumuskan

program Pembangunan Pekon Sukoharjo IV, dalam hal ini menyusun Pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

Kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 6 (Enam) Tahun kedepan dan merupakan penjabaran dari program-program pembinaan desa guna mencapai Visi. Kegiatan Pekon Sukoharjo IV periode 2013-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah Pekon Sukoharjo IV dilaksanakan dengan kegiatan :**
 - a. Peningkatan disiplin aparat pemerintah Pekon Sukoharjo IV;
 - b. Pembinaan aparat pemerintah Pekon Sukoharjo IV;
 - c. Rapat koordinasi aparat Pemerintah Desa bersama BHP dengan SKPD Kabupaten, Camat, atau UPT Dinas Kecamatan;
 - d. Pelatihan atau bimbingan teknis tentang pengelolaan kekayaan Pekon Sukoharjo IV, penyusunan perencanaan pembangunan Pekon Sukoharjo IV, pembentukan Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon), kearsipan, administrasi dan keuangan desa, serta komputer, atau sesuai kebutuhan;

- 2) Program tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan Badan Himpun Pemekonan (BHP) sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dilaksanakan dengan kegiatan:**
 - a. Pengisian kekosongan perangkat Pekon Sukoharjo IV;
 - b. Reorganisasi Badan Himpun Pemekonan (BHP) Periode 2013-2019;
 - c. Pemilihan Kepala Pekon Sukoharjo IV masa jabatan 2013-2019;

- d. Penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Pekon Sukoharjo IV pada setiap akhir tahun;
- e. Penyusunan Peraturan Pekon tentang Kewenangan Pekon.

3) Program peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Pengisian buku-buku administrasi desa secara rutin dan benar;
- b. Pengisian buku-buku keuangan desa dan pembuatan SPJ secara baik dan tepat waktu;
- c. Pengelolaan ketata usahan secara benar dan prosedural;
- d. Pengelolaan kearsipan secara baik dan benar;
- e. Pengisian buku profil desa dan pembuatan papan (data dinding) profil desa;
- f. Penambahan pengadaan komputer/laptop.

4) Program peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Memberikan pelayanan administrasi secara cepat, tepat dan transparan;
- b. Memberikan layanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat;
- c. Pengadaan papan informasi;
- d. Penyelesaian renovasi balai desa;
- e. Pembangunan Kantor BHP, PKK dan LPM;
- f. Pemeliharaan gedung kantor desa (kebersihan, pengecatan dan rehab kecil).

5) Program peningkatan ketertiban dan keamanan desa, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Ronda malam dimasing-masing lingkungan RT;
- b. Pemeliharaan lampu penerangan jalan;
- c. Penambahan dan pemeliharaan Poskamling;
- d. Pemantauan penduduk pendatang oleh petugas Linmas setiap hari secara bergilir;
- e. Pengadaan pakaian seragam Satgas Linmas.

6) Program peningkatan fasilitas dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Pembangunan jalan
- b. Pembangunan Saluran Irigasi

7) Program pengembangan lembaga ekonomi Pekon yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Inventarisasi lembaga ekonomi Pekon Sukoharjo IV;
- b. Pembinaan dan pengembangan lembaga ekonomi Pekon Sukoharjo IV
- c. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- d. Penguatan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

8) Program pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jalan, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Pembangunan talud jalan;
- b. Pembangunan Jalan Telford / Onderlagh;
- c. Pembangunan Drainase
- d. Pembangunan Gorong – Gorong Plat Beton

9) Program pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Pemeliharaan gedung dan fasilitas lain Taman Kanak Kanak;
- b. Bantuan keuangan untuk kemajuan pendidikan TK;
- c. Pembangunan gedung Majelis Pendidikan Al Qur'an (MPQ);
- d. Bantuan keuangan untuk kemajuan Majelis Pendidikan Al Qur'an.

10) Program peningkatan upaya kesehatan masyarakat, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Pembinaan dan pengembangan posyandu balita;
- b. Pembinaan dan pengembangan posyandu lansia;
- c. Pembinaan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia.
- d. Gerakan Jum'at bersih;
- e. Pembangunan instalasi/perpipaan air bersih dan MCK setiap rumah tangga;
- f. Penanganan dan pengelolaan sampah.

11) Program peningkatan minat baca masyarakat, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Pengembangan perpustakaan Pekon Sukoharjo IV;
- b. Pengadaan buku-buku perpustakaan Pekon Sukoharjo IV.

12) Program pelestarian budaya dan adat istiadat Pekon, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Pembinaan dan pengembangan kelompok kesenian tradisional;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan Gedung Kesenian;
- c. Pentas seni tradisional;
- d. Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Besar Keagamaan, serta budaya dan adat istiadat desa;
- e. Bantuan pengadaan peralatan kesenian.

13) Program peningkatan sarana olahraga dan kepemudaan, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Pemberian bantuan pengadaan sarana olah raga;
- b. Penyelesaian renovasi lapangan sepak bola;
- c. Pembangunan pagar keliling lapangan sepak bola.

14) Program penyelamatan lingkungan hidup, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Penanaman dan pemeliharaan turus jalan;
- b. Penanaman tanaman keras.

15) Program peningkatan kualitas iman dan ketaqwaan umat beragama serta fasilitas keagamaan, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Pengajian secara rutin;
- b. Pembinaan dan pengembangan kelompok yasinan;
- c. Perbaikan dan pemeliharaan tempat ibadah;

16) Program peningkatan kemampuan dan profesionalisme anggota dan pengurus lembaga kemasyarakatan Pekon, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Pembinaan anggota dan pengurus LPM, PKK, RW dan RT;
- b. Mengikutsertakan anggota dan pengurus lembaga kemasyarakatan Pekon Sukoharjo IV dalam setiap pelatihan atau bimbingan teknis.

17) Program peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Pekon, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Penetapan lembaga kemasyarakatan Pekon dengan Peraturan Pekon
- b. Pemberian bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan Pekon;

18) Program penyusunan perencanaan pembangunan Pekon yang terarah, terpadu, aspiratif, dan tanggap terhadap perubahan, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Penyusunan RPJM-Des tahun 2013-2019;
- b. Penyusunan RKP-Des tahun 2013-2019;
- c. Melaksanakan P3MP (Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Pekon);
- d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon Sukoharjo IV (Musrenbang).

19) Program pelaksanaan pembangunan secara terbuka, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengutamakan skala prioritas Pekon dan tingkat manfaat untuk masyarakat Pekon, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Menyusun skala prioritas pembangunan Pekon Sukoharjo IV;
- b. Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan;
- c. Memasang papan informasi secara jelas di lokasi pembangunan fisik.

20) Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan Pekon melalui swadaya serta gotong royong, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Kerja bakti masyarakat secara rutin;
- b. Penggalian dana dari masyarakat untuk pembangunan desa melalui jimpitan;

21) Program pemberian bantuan dan perlindungan sosial untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Pemugaran rumah tidak layak huni;

- b. Pembuatan jamban keluarga;
- c. Peningkatan akses kesehatan melalui jamkesmas;

22) Program pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat miskin, dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. Pemberian bantuan permodalan;
- b. Penyelenggaraan kursus-kursus ketrampilan;
- c. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dalam padat karya;
- d. Pembinaan masyarakat miskin untuk mengembangkan potensi yang ada;

10. Pengertian Desa

Pengertian umum adalah pengertian yang banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya tentang hakekat atau tentang definisi dari obyek tertentu yang dibahas. Pada umumnya, desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan.

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di wilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Eddi Handono dalam bukunya *Membangun TanggungGugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*(2005; 132), desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu: (1) desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam, dan (2) desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.

11. Ciri- Ciri Desa

Ciri-ciri umum desa menurut Suhartono, yaitu

1. Pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (agraris)

2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang dominan
3. Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya
4. Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dengan sendirinya”.
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat daripada kota.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diantaranya:

1. jumlah penduduk, yaitu:
 - a. wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - b. wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - c. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - d. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;

- e. wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - f. wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - g. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - h. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
2. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 3. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
 4. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 5. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota;
 6. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
 7. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Struktur Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut *staf*. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi 91 halaman termasuk penjelasan, didalamnya mengatur tentang :

- a) Peraturan Desa dan Kewenangan Desa
- b) Pemerintahan Desa

- c) Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa
- d) Keuangan dan Kekayaan Desa
- e) Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan
- f) Badan Usaha Milik Desa
- g) Kerjasama Desa
- h) Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan
- i) Pembinaan dan Pengawasan Desa dan Camat atau sebutan yang lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa kewenangan Desa meliputi :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) Kewenangan yang digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota;
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan .

Kewenangan Desa berdasarkan hak atas asal usul terdiri dari :

- 1) Sistem organisasi masyarakat adat;
- 2) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- 3) Pembinaan lembaga hukum adat;
- 4) Pengelolaan tanah kas desa;
- 5) Pengembangan peran masyarakat desa.

Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit diantaranya meliputi :

- 1) Pengelolaan tambahan perahu;
- 2) Pengelola pasar desa;
- 3) Pengelolaan tempat pemandian umum;
- 4) Pengelolaan jaringan irigasi;
- 5) Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
- 6) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- 7) Pengelolaan embung desa;
- 8) Pengelolaan air minum berskala desa;
- 9) Pembuatan jalan desa antar pemukiman kewilayah pertanian.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab VI Pasal 67 Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

- 1) Desa berhak
 - a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
 - c. Mendapatkan sumber pendapatan
- 2) Desa berkewajiban
 - a. Melindung dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan kutuhan Negara Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;

- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- 3) Masyarakat desa berhak
- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. Memilih, dipilih, dan / atau ditetapkan menjadi
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa.
- 4) Masyarakat desa berkewajiban
- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;

- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di Desa
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

B.. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Ditingkat lokal penelitian ini relevan dengan salah satu penelitian yang dilakukan Defta Rusti Permata Sari mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Adapun judul penelitiannya adalah “Pola Pembinaan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung Tahun 2013”.
 Persamaan Penelitian skripsi “ Pembahasan Tentang Pembinaan”.
 Perbedaannya pada subjek penelitian yaitu subjek masyarakat desa dan anak jalanan.

2. Tingkat Nasional

Dalam penelitian Jurnal yang berjudul “Peranan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat Desa (Studi Pada Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi berbasis Masyarakat Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun) . Oleh: Fahmi Dasrizal. Tahun 2015. Universitas Maritim Raja Ali haji Tanjung Pinang. Persamaan Penelitian Skripsi “ Program Pembinaan Pada Masyarakat Desa. Perbedaan Penelitian Pada Persepsi Masyarakat dan Peranan Kepala Desa.

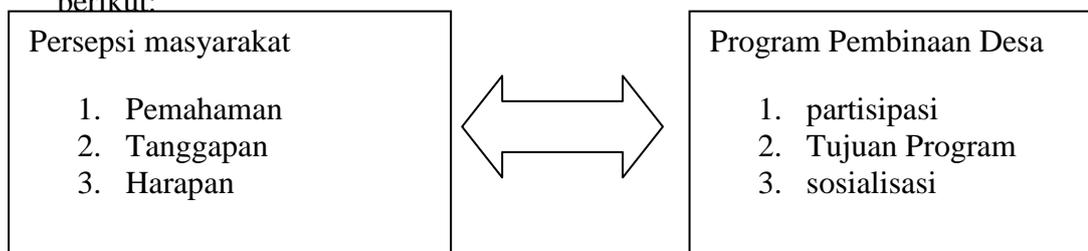
3. Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah program pembinaan desa karena pada dasarnya pembinaan merupakan suatu program dari pemerintah terkhusus pada daerah pedesaan dengan tujuan mengasah ketrampilan atau bakat yang dimiliki masyarakat dalam meningkatkan suatu pembangunan desa. Permasalahan yang timbul adalah persepsi masyarakat bahwa program pembinaan tidak menguntungkan bagi mereka dan tidak membuat desa mereka menjadi lebih maju dalam pembangunan

Persepsi bersifat individu, yang berbeda satu sama lainnya. Meskipun stimulus yang diterima adalah sama, tetapi setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, maka kemampuan berpikir dari setiap individu juga akan berbeda. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi dan pendapat pada setiap orang.

Dengan adanya persepsi dari masyarakat maka peneliti dapat mengetahui apakah program pembinaan desa tidak akan memajukan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat tarik suatu kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai salah satu cara untuk memecahkan suatu masalah atau permasalahan yang dihadapi, memegang peranan penting dalam suatu penelitian ilmiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi saat ini dan menuntut untuk mencari jalan keluarnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan, pengaruh yang sedang nampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya (Arikunto, 2006:129)".

Sedangkan menurut Usman Rianse (2009:185), "Metode deskriptif merupakan suatu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah aktual yang ada pada masa sekarang". Sesuai dengan definisi diatas maka penggunaan penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini sangat cocok untuk diterapkan dalam penelitian ini, karena sasaran yang dikaji dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap program pembinaan desa

dalam rangka pembangunan desa di Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Suharsimi Sofar Silaen dan Yayak Heriyanto, (2013:93) “populasi adalah keseluruhan subjek atau individu yang memiliki karekteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti”.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat di Desa Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yaitu berjumlah 1360 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 7 RT dan jumlah KK yang ada 436 di Pekon Sukoharjo IV.

Tabel 3. Populasi Penelitian masyarakat di Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

No	Dusun	Jumlah KK
1	RT I	49
2	RT II	71
3	RT III	42
4	RT IV	78
5	RT V	62
6	RT VI	64
7	RT VII	70
Jumlah		436

Sumber: Data Demografi Pekon Sukoharjo IV.

2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian merupakan sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sampel merupakan bagian dari data penelitian yang diambil dari populasi. Menurut Suharsimi Sofar Silaen dan Yayak Heriyanto, (2013:93) “sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya, kemudian ditarik kesimpulan mengenai karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi”.

Dalam menentukan sampel, apabila populasinya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga merupakan penelitian populasi. Tetapi jika populasinya lebih dari 100 maka dapat diambil 10%-20% atau 20%-25%. Jumlah sampel dalam penelitian ini diambil 10% dari jumlah KK berjumlah 436 yang tersebar pada 7RT di Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Jadi sampel penelitian ini adalah : $10\% \times 436 = 43,6$ KK dibulatkan menjadi 43 KK.

Tabel 4 Sampel Penelitian masyarakat di Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

No	Dusun	Jumlah Sampel
1	RT I	$49 \times 10\% = 5$
2	RT II	$71 \times 10\% = 7$
3	RT III	$42 \times 10\% = 4$
4	RT IV	$78 \times 10\% = 8$
5	RT V	$62 \times 10\% = 6$
6	RT VI	$64 \times 10\% = 6$
7	RT VII	$70 \times 10\% = 7$
jumlah		43

Sumber: Analisis Data Primer

C. Variabel Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:118), “Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu

1. Persepsi Masyarakat
2. Program Pembinaan Desa.

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual variabel berbicara tentang bagaimana variabel tersebut dibaca dari sisi konsep yang tujuannya adalah supaya tidak terjadi interpretasi yang salah atau keliru tentang variabel tersebut, misalnya menghindari terjadinya interpretasi ganda (Rianse, 2009:225).

Definisi konseptual diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat adalah pandangan atau kesan dari individu seseorang yang ada dalam masyarakat terhadap suatu objek peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya dan akan memberikan tanggapan tersendiri terhadap objek yang diperhatikan.

b. Program pembinaan desa

program pembinaan desa adalah suatu program yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk mengembangkan keahlian, pengetahuan secara profesional sehingga menimbulkan kerjasama.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan definisi yang memberikan gambaran cara mengukur suatu variabel dengan memberikan arti suatu kegiatan.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

- a. Persepsi masyarakat adalah kesan masyarakat berdasarkan pemahaman dan pengalaman dalam kehidupan masyarakat. Persepsi ini terdiri dari analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu memperoleh makna.

Adapun indikator yang dijadikan tolak ukur dalam persepsi masyarakat yaitu:

1. Pemahaman Masyarakat
2. Tanggapan Masyarakat
3. Harapan Masyarakat

program pembinaan desa adalah suatu program yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pelatihan ketrampilan, pengembangan keahlian, pelatihan industri kecil

dengan cara sosialisasi. Adapun indikator-indikator yang dapat mengukur program pembinaan desa yaitu

1. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pembinaan desa
2. Tujuan dari program pembinaan desa
3. Sosialisasi dari pemerintah desa dan kecamatan

E. Rencana Pengukuran Variabel

Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal, maka dibutuhkan alat ukur yang tepat. Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah dengan pemberian skor pada alternatif jawaban yang tersedia dalam angket yang telah disebarakan kepada responden. Angket yang digunakan dalam penelitian adalah angket dengan menggunakan skala pengukuran yaitu skala likert sehingga responden memiliki kesempatan untuk memilih jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pendapatnya masing-masing.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah dalam penelitian, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Pokok

1.1 Angket

Angket adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden.

Guna mendukung teknik pengumpulan data dengan angket maka dibutuhkan skala pengukuran yang tepat. Peneliti menggunakan skala likert dalam penelitian ini karena skala likert dianggap sebagai skala pengukur yang tepat untuk mengukur sikap atau intensitas pendapat masyarakat. Menurut Silaen (2013:127), nilai skor tertinggi diberikan untuk alternatif jawaban yang sangat diharapkan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian dan nilai skor terendah diberikan pada alternatif jawaban yang tidak diharapkan. Peneliti menggunakan skala likert dengan jenjang nilai skor 1 sampai 3. Berikut adalah jenjang nilai skor yang ditetapkan oleh peneliti:

Setuju, skor 3

kurang setuju, skor 2

Tidak setuju, skor 1

2. Teknik Penunjang

2.1 Wawancara

Teknik pengambilan data dengan wawancara dilakukan melalui tanya jawab lisan dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden. Teknik wawancara digunakan bila terdapat data yang kurang jelas ataupun kurang lengkap dari hasil angket yang di berikan kepada responden. Selain itu, wawancara juga dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan dari responden. Wawancara akan

dilakukan terhadap beberapa sampel yaitu masyarakat Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

2.2 Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian dengan meninjau langsung lokasi penelitian untuk melihat fenomena, kondisi atau keadaan. Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

G. Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Validitas

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian maka diperlukan alat ukur yang baik dan valid. Alat ukur dikatakan valid jika mampu memberikan skor yang akurat-teliti yaitu mampu menunjukkan ukuran besar kecilnya dan graduasi dari suatu gejala dengan tepat. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:168), "Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen".

Dalam penelitian ini uji validitas alat tes yang akan digunakan *logical validity* yaitu dengan cara mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam sebuah penelitian wajib untuk dilakukan. Uji reliabilitas angket dapat ditempuh dengan:

1. Melakukan uji coba angket kepada 10 orang diluar responden.
2. Hasil uji coba dikelompokkan dalam item ganjil dan item genap.
3. Hasil item ganjil dan genap kemudian dikorelasikan dengan rumus *product moment*, yaitu:

$$r_{XY} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

R_{xy} = Hubungan variabel x dan y

x = Variabel Bebas

y = Variabel Terikat

N = Jumlah sampel yang diteliti

(Suharsimi Arikunto, 2010:213)

4. Kemudian untuk mengetahui reliabilitas angket digunakan rumus Spearman-Brown (Suharsimi Arikunto, 2006:180):

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1+(r_{gg})}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien reliabilitas seluruh item

r_{gg} = Koefisien korelasi item ganjil dan item genap

1. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

0,800– 1,00 = Reliabilitas sangat tinggi

0,600– 0,800 = Reliabilitas tinggi

0,400 – 0, 600 = Reliabilitas cukup

0,200 – 0,400 = Reliabilitas rendah

0,000- 0,200 = Reliabilitas sangat rendah

(Suharsimi Arikunto, 2010:75)

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul dari penyebaran angket kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi sebenarnya.

Untuk menganalisis data dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi dalam Nafilah (2005:39) yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Terendah

K = Kategori Interval

Penentuan tingkat presentase pada setiap tabel kesimpulan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Muhammad Ali sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Besarnya Presentase

F = Jumlah jawaban dari seluruh item

N = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden

Menurut Suharsimi Arikunto (2009:196), “Untuk menafsirkan banyaknya presentase yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut”:

76% - 100% = Baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55% = Kurang Baik

0 - 39% = Tidak Baik

I. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini pada hakekatnya merupakan suatu persiapan atau rencana yang sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan rencana. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Persiapan Pengajuan Judul

Langkah awal dalam penelitian ini penulis mengajukan judul yang terdiri dari dua alternatif pilihan kepada dosen pembimbing akademik. Setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik, selanjutnya penulis mengajukan judul tersebut kepada Ketua Program Studi PPKn dan disetujui padatanggal 28 Desember2017 sekaligus ditentukan dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pembantu.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah mendapat surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Nomor peneliti melakukan penelitian pendahuluan kepada Kepala Desa dan Masyarakat Pekon Sukoharjo IV. Dalam hal ini peneliti melaukan wawancara kepada Kepala Desa beserta masyarakat yang ada di Pekon Sukoharjo IV untuk mengetahui tentang pemahaman, tanggapan, dan harapan masyarakat terhadap Program Pembinaan Desa. 118/UN26.13/PN.01.00/2018penelitian ini ditunjang dengan beberapa literatur dan arahan dari dosen pembimbing. Pada tanggal 23 februari 2018 disetujui oleh pembimbing 1 (utama) untuk melaksanakan seminar proposal yang kemudian disahkan oleh Ketua Program Studi PPKn. Hal

tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan masukan-masukan atau saran dari dosen pembahas untuk kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan setelah melaksanakan seminar proposal. Setelah melakukan proses konsultasi dan perbaikan-perbaikan proposal skripsi kepada dosen pembimbing 1 dan II maka seminar proposal dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah perbaikan proposal skripsi dengan konsultasi kepada dosen pembahas dan dosen pembimbing.

4. Pelaksanaan Penelitian

a. Persiapan Administrasi

Berdasarkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan nomor 118/UN26.13/PN.01.00/2018 tanggal 03 Maret 2018 yang ditunjukan kepada Kepala Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan persiapan kelengkapan penelitian telah diuji coba, maka peneliti merencanakan tanggal dan hari bersama responden untuk mengadakan penelitian.

b. Penyusunan Alat Pengumpul Data

sesuai dengan alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan angket atau kuisisioner yang akan diberikan kepada responden berjumlah 39 responden dengan jumlah 24 item soal pertanyaan angket yang terdiri dari tiga alternatif jawaban.

Adapun langkah- langkah dalam pembuatan angket ini adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat kisi- kisi angket mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Program Pembinaan Desa di Pekon Sukoharjo IV
- 2) Mengkonsultasikan angket kepada Pembimbing I dan Pembimbing II
- 3) Setelah angket tersebut disetujui oleh pembimbing I dan Pembimbing II, maka peneliti melakukan uji coba angket kepada sepuluh responden diluar populasi sebenarnya.

5. Pelaksanaan Uji Coba Angket

a. Analisis Validitas Angket

Dalam penelitian ini menggunakan *LocigalValidity*, yaitu dengan cara mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing dan berdasarkan konsultasi tersebut maka dilakukan perbaikan. Setelah dinyatakan valid, instrumen baru digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Analisis Uji CobaAngket

Untuk menentukan reliabilitas dalam penelitian ini, maka peneliti berpedoman pada teori Arikunto, Suharsimi (2006:221) menyatakan “Reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”.

Adapun langkah- langkah yang harus dilakukan sebagai berikut :

1. Peneliti menyebarkan angket kepada 10 orang diluar responden untuk uji angket
2. Untuk menguji reliabilitas angket digunakan tehnik belah dua atau ganjil dan genap.

Berikut adalah hasil uji angket yang telah dilakukan sebagai berikut :

Tabel5. hasil Uji Coba Angket Kepada Sepuluh Responden di Luar Populasi Untuk Iteem Ganjil (X)

No	Nomor Item Ganjil (X)												Skor
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	
1	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2	30
2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	33
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	34
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
5	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	34
6	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	33
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	35
8	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	32
9	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2	31
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35
Jumlah												333	

Sumber :Analisi Uji Coba Angket

Dari tabel 5. diketahui $\sum X = 333$ yang merupakan hasil dari penjumlahan skor uji coba angket kepada sepuluh (10) orang diluar responden dengan indikator item ganjil. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam tabel kerja hasil uji coba angket antara item ganjil (X) dengan item genap(Y) untuk mengetahui besar reliabilitas kevalidan instrumen penelitian

Tabel 6. hasil Uji coba Angket epada Sepuluh Responden di Luar Populasi untuk item Genap (Y)

No	Nomor Item Genap (Y)												Skor
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
1	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	33
2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	33
3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	35
4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	34
5	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	33
6	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	2	32
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
8	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	31
9	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2	30
10	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	34
Jumlah												330	

Sumber :Analisi Uji Coba Angket

Dari tabel 6.diketahui $\sum X = 330$ yang merupakan hasil dari penjumlahan skor uji coba angket kepada sepuluh (10) orang diluar responden dengan

indikator item genap. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam tabel kerja hasil uji coba angket antara item ganjil (X) dengan item genap(Y) untuk mengetahui besar reliabilitas kevalidan instrumen penelitian.

Tabel 7. Distribusi antara Item Ganjil (X) dengan Item Genap (Y) Mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Program Pembinaan Desa

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	30	33	900	1089	990
2	33	32	1089	1024	1056
3	34	35	1156	1225	1190
4	36	34	1296	1156	1224
5	34	33	1156	1089	1122
6	33	32	1089	1024	1056
7	35	36	1225	1296	1260
8	32	31	1024	961	992
9	31	30	961	900	930
10	35	34	1225	1156	1190
jumlah	333	330	11121	10920	11010

Sumber : Analisis Data Primer

Tabel 7. merupakan hasil dari penggabungan skor uji coba angket kepada sepuluh (10) orang diluar responden dengan indikator item ganjil(X) dan genap (Y). Hasil keseluruhan dari tabel tersebut akan dikorelasikan menggunakan *Product Moment* untuk mengetahui besarnya koefisien korelasi instrumen penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh diatas , maka dikorelasikan untuk mengetahui reliabilitas dengan rumus *Product Moment* sebagai berikut :

$$r_{XY} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Diketahui :

$$\begin{array}{lll} \sum X = 333 & \sum X^2 = 11121 & \sum XY = 11010 \\ \sum Y = 330 & \sum Y^2 = 10920 & N = 10 \end{array}$$

Dengan rumus diatas, maka data yang telah diketahui dirumuskan untuk membuktikan reliabilitas dalam rumus sebagai berikut

$$r_{XY} = \frac{10 \times 11010 - (333)(330)}{\sqrt{\{10 \times 11121 - (333)^2\}\{10 \times 10920 - (330)^2\}}}$$

$$r_{XY} = \frac{110100 - 109890}{\sqrt{\{111210 - 110889\}\{109200 - 108900\}}}$$

$$r_{XY} = \frac{210}{\sqrt{(321)(300)}}$$

$$r_{XY} = \frac{210}{\sqrt{96300}}$$

$$r_{XY} = \frac{210}{310,32}$$

$$r_{XY} = 0,67$$

Maka, untuk mengetahui koefisien reliabilitasnya digunakan rumus

Sperman Brown sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1+(r_{gg})}$$

$$r_{xy} = \frac{2(0,67)}{1+(0,67)}$$

$$r_{xy}=0,80$$

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

0,800– 1,00 = Reliabilitas sangat tinggi

0,600– 0,800 = Reliabilitas tinggi

0,400 – 0,600 = Reliabilitas cukup

0,200 – 0,400 = Reliabilitas rendah

0,000- 0,200 = Reliabilitas sangat rendah

Hasil perhitungan tersebut dapat diketahui $r_{xy} = 0,80$ selanjutnya indeks reliabilitasnya termasuk ke dalam kriteria 0,600- 0,800 merupakan reliabilitas tinggi berarti angket yang digunakan dalam penelitian ini memiliki reliabilitas tinggi. Dengan demikian angket mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Program Pembinaan Desa di Pekon Sukoharjo IV dapat digunakan dalam penelitian ini atau memenuhi syarat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data analisis instrumen penelitian berupa angket, dapat disimpulkan bahwa :

Persepsi Masyarakat Terhadap Program Pembinaan Desa Di Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, mendapat respon cenderung positif sebanyak 17 responden atau 39,53 % dari hasil angket kepada 43 responden masyarakat mempunyai tanggapan yang baik terhadap program pembinaan desa yang dapat mensejahterakan masyarakat. Masyarakat mulai mengetahui dan memahami sektor- sektor yang menjadi program pembinaan desa sehingga membuat masyarakat sadar pentingnya berpartisipasi atau mengikuti program pembinaan desa.

Berdasarkan setiap indikator pemahaman, tanggapan, dan harapan cenderung positif. Dimana hasil dari angket pada indikator pemahaman paling banyak berkategori kurang paham sedangkan dari indikator tanggapan memperoleh skor paling banyak berkategori setuju dan indikator harapan terdapat paling banyak kategori setuju Hasil persepsi

masyarakat tidak konsisten dikarenakan masyarakat banyak yang kurang paham terhadap program pembinaan desa namun mempunyai tanggapan yang baik dan mempunyai harapan terhadap program pembinaan desa karena kurang peduli dan kurang berpartisipasi membuat masyarakat kurang paham.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan peran Kepala Pekon dalam mensosialisasikan program pembinaan desa kepada masyarakat Pekon Sukoharjo IV kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
2. Kepada pengurus program pembinaan desa Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dapat lebih memberikan dorongan dan ajakan agar masyarakat mengikuti program pembinaan desa.
3. Meningkatkan penyuluhan dan pelatihan bagi warga dan aparat desa Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu guna meningkatkan SDM dan memberikan pelayanan yang optimal
4. Kepada masyarakat Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dapat mendukung dan ikut berpartisipasi aktif agar program pembinaan desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan

5. Untuk ibu-ibu dan Pemuda Pekon Sukoharjo IV Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dapat lebih meningkatkan partisipasi dan lebih peduli terhadap Program- Program Pembinaan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Alliah, Nurul. 2016. “ Persepsi Amsyarakat Terhadap Keberadaan Koperasi Mekar Sari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya Di Desa Siliwangi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringswu”. Skripsi FKIP Universitas Lampung
- Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Ariani, Netty. 2014.” Ketrampilan Kepemimpinan Kepala Desa karang Anyar Dalam Pembangunan Non Fisik Desa”. *Skripsi* FKIP Universitas Lampung
- Arikunto, Suharsimi.2006. *Prosedur Penelitian Studi Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dasrizal, Fahmi. 2015. ”Peranan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat Desa”. *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang
- Handono, Edi B. 2005. *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintah Desa*. Yogyakarta
- Ismawati, Esti. 2012. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Peraturan Pemerintah. 2014. Nomor 43. Tantang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2007. Nomor 7. *Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat*

- Purwanti, Indah. “ Studi Kasus Tentang Pemahaman Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Di SDN Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”. *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*
- Rainse, Usman,dkk.2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta
- Rencana Program Pembagunan dan Pembinaan Jangka Menengah Pekon Sukoharjo IV
- Sari, Defta Rustin Permata. 2013. ” Pola pembinaan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung”. *Skripsi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*
- Shadily, Hassan.1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sidik, Permana . 2016. *Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish
- Silaen, Sofar,dkk.2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: In Media
- Soelaeman, Moenandar. 2009. *Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu* .Bandung : Refika Aditama
- Suryadi, Bambang. 2017. Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa
- Syani, Abdul. 2007 *Sosiologi Skematika ,Teori,Dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Talizi, Hudu, Draha.1981. *Dimensi- Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bina Aksara
- Undang Undang Republik Indonesia. Nomor 6. Tahun 2014. Tentang Desa
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV Andi Offset